

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PT. INDOMARCO (INDOMARET) PRISMATAMA CABANG MANADO

Nathalia T. Kumendong, Sjeddie R. Watung, Mirchael Miran

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email: nataalkumendong97@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara dan sistem perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap di PT. Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Langowan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Dari hasil perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 ternyata perusahaan ini belum melakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan, karena dalam perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan ternyata Untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang, perusahaan tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP. Hal ini dapat dilihat dari data, sehingga jumlah PPh pasal 21 yang disetorkan masih kurang bayar. Oleh karena itu, perusahaan harus mengetahui informasi terbaru tentang undang-undang dan peraturan perpajakan.

Kata Kunci: Perhitungan dan Pemotongan PPh 21

Abstract: The purpose of this research is to find out how and the system of calculation and reduction of PPh Article 21 on the salary of permanent employees in PT. Indomarco (Indomaret) Prismatama Branch Manado Area Amongena Langowan. The type of research used is descriptive research. From the results of the calculation and reduction of PPh Article 21 it turns out this company has not done in accordance with the taxation laws, because in calculation of the PPh article 21 on the salary of employees turned out to avoid errors in calculating and reducing the tax owed, the company does not impose a fine on the permanent employees who do not have NPWP. This can be seen from the data, so the amount of PPH Article 21 deposited is still underpaid. Therefore, companies should be aware of the latest information about tax laws and regulations.

Keyword: Calculation and Deduction of Income Tax 21

PENDAHULUAN

Pajak adalah uang yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara. Semua uang yang dibayarkan rakyat melalui pajak akan dimasukkan ke pos pendapatan negara dari sektor pajak menggunakannya untuk membiayai belanja untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat pusat dan daerah (Ramdani, 2021). Dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya, pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama negara di Indonesia. Pajak secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan negara dengan memperbaiki dan membangun sarana publik. Pajak berfungsi sebagai dasar bagi pembangunan negara untuk mencapai tujuan tertentu

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada individu atau badan atas gaji, honorarium, upah, dan yang lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Pasal 21 juga merupakan pajak terutang atas penghasilan yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak.

Pegawai adalah bagian penting dari kesuksesan perusahaan. Untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan, perusahaan akan memberikan berbagai fasilitas dan tunjangan, seperti BPJS, tunjangan hari raya, dan tunjangan anak dan istri (Jumrama, 2018). Diharapkan bahwa karyawan akan merasa lebih baik dengan tunjangan ini. Dalam kasus ini, perusahaan harus memotong dan membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada karyawannya.

Perhitungan ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pelaksanaan pajak.

PT Indomarco (indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan Merupakan jaringan bisnis waralaba minimarket yang terbesar di Indonesia. Minimarket indomaret menyediakan segala macam kebutuhan Masyarakat mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari dan indomaret memiliki sejumlah 17 pusat distribusi yang menyalurkan produk dagang 4.800 bahkan lebih jenis produk ke seluruh cabang indomaret di Indonesia.

PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Langowan memiliki 7 pegawai tetap, yang berarti mereka harus memotong dan membayar PPh Pasal 21. Dari 7 pegawai tetap, 2 belum memiliki NPWP, menurut Undang-undang Nomor 07 Tahun 2021 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai alat administrasi perpajakan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi Seseorang akan dikenakan sanksi jika mereka dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk NPWP atau tidak melaporkan bisnis mereka sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga mengurangi pendapatan negara.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro (Palit, Sumual, and Manengkey 2020) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

PPh pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan.

Fungsi Pajak

Dalam masyarakat, pajak melakukan dua fungsi utama: penerimaan dan pengaturan. Selain itu, pajak juga melakukan distribusi dan demokrasi.

Menurut Bastari (2015:3) menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi penerimaan pajak adalah untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk membiayai pengeluaran negara, baik rutin maupun pembangunan
- b. Fungsi mengatur adalah fungsi pajak untuk mengatur situasi di bidang sosial, ekonomi, dan politik menurut keputusan pemerintah. Contoh lain adalah pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk barang impor untuk melindungi produksi domestik
- c. Fungsi distribusi pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, manfaatnya mencakup seluruh masyarakat, bukan hanya komunitas local atau kelompoknya.
- d. Fungsi Demokrasi pajak Sesuai dengan definisi dan karakteristiknya, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat, yaitu dibayar kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jenis-Jenis Pajak

Sedangkan selain menurut pengertian dan fungsinya pajak juga memiliki jenis – jenis yang menurut Sukrisno Agoes (2013:7) jenis pajak di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

Menurut sifatnya Pajak dibagi 2 (dua) menjadi yaitu:

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.

- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Subjek Pajak

Menurut UU No.7 tahun 2021 pasal 2 ayat 1 yang menjadi subjek pajak adalah: orang pribadi, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap.

- a. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan
- b. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri
- c. Subjek pajak dalam negeri

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Pasal 4 Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap kemampuan ekonomi tambahan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pemotongan PPh pasal 21

Pemotongan PPh pasal 21 menurut (Claudio J. Wowiling, Mareyke G.V. Summual, Lenny L. Evinita 2023) adalah bentuk perusahaan permanen yang diperlukan untuk memotong pajak atas upah, gaji dan pendapatan orang lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dengan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan disertai dengan gambar atau foto dari subjek yang dapat diamati perilakunya. Sebuah deskripsi yang rinci, mudah dipahami, dan akurat adalah harapan. Penelitian deskriptif kualitatif bersifat terbuka, yang berarti masalah penelitian dapat diubah sesuai dengan proses kerja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan

Dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, perhitungan dilakukan untuk menentukan wajib pajak yang harus membayar pajak yang telah ditentukan. PT. Indomarco (Indomaret) Prismaatama cabang Manado area Amongena Langowan memiliki lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai pajak penghasilan No. 7 Tahun 2021, seperti berikut:

Tabel 4.1
Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Lapisan penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60 juta	5%
Diatas Rp60 juta - Rp250 juta	15%

Diatas Rp250 juta - Rp500 juta	25%
Diatas Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
Diatas Rp5 miliar	35%

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut Perhitungan PT. Indomarco (Indomaret) Prismaatama cabang manado area amongena langowan Karyawan yang tidak memiliki NPWP:

Karyawan B.G Perhitungan dan pemotongan gaji karyawan tetap. Karyawan yang tidak memiliki NPWP PT Indomarco (Indomaret) Prismaatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan dan menurut undang-undang pajak. Pegawai G bekerja di PT Indomarco (Indomaret) Prismaatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan sebagai karyawan tetap dengan status TK/0 memperoleh gaji setahun Rp. 37.668.000, Tunjangan Rp. 4.800.000, Lembur Rp.3.901,013 Bonus Rp, 2.000.000, BPJS Tenaga Kerja Rp. 852.000, BPJS Kesehatan Rp. 432.000, BPJS DN Pensiun Rp. 432.000. besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-undang
Gaji setahun	37.668.000	37.668.000
Tunjangan	4.800.000	4.800.000
Upah lembur	3.901.013	3.901.013
Bonus	2.000.000	2.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto	48.369.013	48.369.013
Biaya jabatan 5%	2.418.451	2.418.451
BPJS tenaga kerja	852.000	852.000
BPJS kesehatan	432.000	432.000
BPJS DN Pensiun	432.000	432.000
Jumlah biaya-biaya	4.134.451	4.134.451
Penghasilan netto setahun	44.234.562	44.234.562
PTKP TK/0	54.000.000	54.000.000
PKP	9.765.438	9.765.438
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x 9.765.438	488.272	488.272
Menurut Undang-undang		
5% x 120% x 9.765.438		585.926

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat bahwa penghasilan bruto karyawan B.G sebesar Rp. 48.369.013 setahun adalah total seluruh penghasilan dan tunjangan-tunjangan jumlah bruto dikurangi dengan biaya-biaya, kemudian

jumlah biaya dikurangi dengan penghasilan bruto sehingga terdapat jumlah penghasilan netto setahun Rp. 44,234.562. Penghasilan tersebut dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) tersebut kemudian dikalikan dengan tarif PPh Pasal 21 sebesar 5% dan akan mendapatkan hasil untuk PKP setahun Rp 488,272. Sedangkan menurut penulis perhitungan PKP setahun sebesar Rp. 585.926 karena dalam perhitungan menurut penulis karyawan yang tidak memiliki NPWP diberikan potongan/ denda sebesar 120%

Karyawan J.P Perhitungan dan pemotongan gaji karyawan tetap. Karyawan yang tidak memiliki NPWP PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan dan menurut undang-undang pajak. Pegawai F bekerja di PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan sebagai karyawan tetap dengan status TK/0 memperoleh gaji setahun Rp. 37.668.000, Tunjangan Rp. 4,800,000, Lembur Rp.3.346.841 Bonus Rp, 2,000,000, BPJS Tenaga Kerja Rp. 900.000, BPJS Kesehatan Rp. 420,000, BPJS DN Pensiun Rp. 420.000. besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-undang
Gaji setahun	37.668.000	37.668.000
Tunjangan	4.800.000	4.800.000
Upah lembur	3.346.841	3.346.841
Bonus	2.000.000	2.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto	47.814.841	47.814.841
Biaya jabatan 5%	2.390.742	2.390.742
BPJS tenaga kerja	900.000	900.000
BPJS kesehatan	420.000	420.000
BPJS DN Pensiun	420.000	420.000
Jumlah biaya-biaya	4.130.742	4.130.742
Penghasilan netto setahun	43.684.099	43.684.099
PTKP TK/0	54.000.000	54.000.000
PKP	- 10.315.901	10.315.901
PPh Pasal 21 Terutang		-
5% x 10.315.901	- 515.795	515.795
Menurut Undang-undang		-
5% x 120% x 10.315.901		618.954

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat bahwa penghasilan bruto karyawan J.P sebesar Rp. 47,814.841 setahun adalah total seluruh penghasilan dan tunjangan-tunjangan jumlah bruto dikurangi dengan biaya-biaya, kemudian jumlah biaya dikurangi dengan penghasilan bruto sehingga terdapat jumlah penghasilan netto setahun Rp. 43,684.099. Penghasilan tersebut dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP tersebut kemudian dikalikan dengan tarif PPh Pasal 21 sebesar 5% dan akan mendapatkan hasil untuk PKP setahun Rp 515.795 Sedangkan menurut penulis perhitungan PKP setahun sebesar Rp. 618.954 karena dalam perhitungan menurut penulis karyawan yang tidak memiliki NPWP diberikan potongan/ denda sebesar 120%

Menurut perhitungan data di atas tentang perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan, terdapat dua karyawan yang tidak memiliki NPWP. Dengan demikian, perusahaan tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah PPh Pasal 21 yang disetorkan.

Pemotongan Pajak penghasilan PPh pasal 21

Pengurangan pajak penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan tetap seharusnya dilakukan oleh perusahaan, namun karyawan yang seharusnya menanggung pajak tersebut. Namun, berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 oleh PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan belum sesuai dengan undang-undang perpajakan, sehingga mengakibatkan kurangnya pembayaran pajak. Akibatnya, jumlah pajak yang dipotong oleh perusahaan menjadi lebih kecil dari seharusnya

PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Langowan

Dari hasil perhitungan data diatas maka dapat dilihat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan terdapat 2 (dua) karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak). Sehingga dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilihat diatas bahwa perhitungan menurut PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan untuk pertama karyawan J.P hutang pajak sebesar Rp. 315.795 dan menurut penulis mengacu pada Undang-undang perpajakan untuk karyawan J.P perhitungan jumlah hutang pajak sebesar Rp. 618.954, sehingga terdapat selisinya sebesar Rp. 303.159. Kedua karyawan B.G hutang pajak sebesar Rp. 585.926 menurut PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan dan menurut penulis mengacu pada Undang-undang perpajakan untuk karyawan B.G perhitungan jumlah hutang pajak sebesar Rp. 488.272 sehingga terdapat selisinya sebesar Rp. 97.654. Dari data diatas mengenal perhitungan PPh pasal 21 ternyata perusahaan PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan tidak memberikan denda/potongan kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) dalam perhitungan PPh pasal 21. Sehingga terjadi perbedaan perhitungan PPh pasal 21 menurut penulis mengacu pada Undang-undang perpajakan.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 menurut penulis karyawan yang tidak memiliki NPWP diberikan denda/potongan sebesar 120% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan begitu jumlah perhitungan PPh pasal 21 menurut Perusahaan yang disetorkan masih mengalami kurang bayar.

Pemotongan PPh Pasal 21 Pada PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan

Pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan tetap dilakukan dengan karyawan yang tidak memiliki NPWP sedangkan jumlah pajak terutang menurut PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan dan menurut perhitungan dan pemotongan penulis jumlah pajak terutang menurut Undang-undang perpajakan penghasilan, sehingga terjadi selisinya dengan begitu jumlah PPh pasal 21 yang disetorkan masih mengalami kurang bayar. Ternyata perusahaan tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP sedangkan menurut Undang-undang perpajakan Nomor 38 Tahun 2021 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 120% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukan NPWP sehingga terjadinya kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak penghasilan bagi karyawan yang belum memiliki NPWP tidak boleh disamakan bagi karyawan yang sudah memiliki NPWP.

Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan

PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yakni pelaporan dilakukan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak dan apabila tanggal pelaporan tersebut jatuh pada hari libur atau hari minggu, maka tanggal pelaporannya dapat digeser hari kerja. Jika pembayaran ditunda, dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan untuk waktu yang dihitung sejak jatuh tempo. Menurut Pasal 21, batas waktu untuk membayar atau menyetor pajak penghasilan adalah tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pada saat Perusahaan Menggunakan Bukti Pemotongan SPT Formulir 1721-A1 terdapat 2 karyawan PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan yang tidak memiliki bukti pemotongan seharusnya 2 karyawan ini memiliki bukti pemotongan karena dalam perhitungan, pemotongan PPh pasal 21 karyawan yang tidak memiliki NPWP diberikan denda sesuai dengan peraturan perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan adalah sebagai berikut: 1) Dari hasil analisis data terdapat 2 karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP pada PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan sehingga terjadi perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan dan menurut penulis dari data diatas mengenai perhitungan dan pemotongan PPh 21 ternyata Perusahaan tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP dengan begitu jumlah PPh 21 yang disetorkan masih mengalami kurang bayar; 2) Dari hasil analisis dan pembahasan pada PT Indomarco (Indomaret) Prismatama Cabang Manado Area Amongena Kec Langowan ada beberapa karyawan yang tidak memiliki bukti pemotongan SPT dikarenakan karyawan tersebut tidak memiliki NPWP sehingga tidak memiliki bukti pemotongan.

Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Perusahaan harus mengetahui informasi tentang undang-undang dan peraturan perpajakan terbaru agar mereka dapat menghitung dan memotong pajak terutang dengan benar; 2) Seharusnya 2 (Dua) karyawan yang tidak memiliki NPWP harus memiliki bukti pemotongan dan 2 (Dua) karyawan yang tidak memiliki NPWP harus memiliki bukti pemotongan karena tarif pemotongan karyawan yang tidak memiliki NPWP akan diberikan saksi/denda sebesar 120% kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP; dan 3) Perusahaan juga harus memberikan saksi/denda kepada karyawan

yang tidak memiliki NPWP, dan memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., Karamoy, H., & Weku, P. 2021. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan (PPh). *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1786-1797
- Astuti, N. F. 2020. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap Dengan Jenis-Jenisnya. *Merdeka. com*.
- Claudio, Mareyke, Lenny L. Evinita 2023. Analisis Perhitungan Perpajakan PPh Pasal 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Puskesmas Imandi. *Jurnal Ekonomi*
- Hardani, Dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta, Buku CV Pustaka Ilmu John W. Creswell. 2016.
- Indonesia. 2021. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jakarta*
- Indonesia, P. R. 2007. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor, 28.
- Isna Latif, H. S. 2018, Agustus. Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Air Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 427-433.
- Kurniawati, R. 2018. Analisis Perhitungan, Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan. *Medan*: 1-63.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)*.
- Mardiasmo. 2018. Tentang Perpajakan, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi. Rahayu, S.K 2017. *Sumber Buku Konsep Dan Aspek Formal*. Maharani, D. A., Maulita, I., Nasiroh, S., Sitanini, A., & Renovriskha, M. D. 2023. Diseminasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 2362-2367.
- Purbowati, R., & Lestari, R. F. 2018. Analisis Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Setelah Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK. 010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (Study Pada Kpp Pratama Sidoarjo Barat). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 1(2), 77-90.
- Waluyo, P. I. 2016. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jakarta*: Halaman 2.